

# Bab III

## Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan

Penilaian kinerja keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) sangat berbeda dengan penilaian kinerja keuangan perusahaan. Selain berbasis anggaran, keuangan Pemda tidak memiliki tujuan untuk memaksimalkan keuntungan atau laba (profits atau net income), meskipun ada sebutan surplus atau defisit untuk selisih antara pendapatan dan belanja.

Salah satu indikator untuk mengukur kinerja keuangan daerah adalah Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF). Derajat Desentralisasi Fiskal digunakan untuk mengetahui tingkat ketergantungan daerah/kemandirian Kota Tangerang Selatan dengan menghitung rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah. Penerimaan pendapatan asli daerah sejak tahun 2011 terus mengalami peningkatan, dengan rata-rata selama periode 2011-2015 sebesar Rp. 795.515.164.730,- begitu juga dengan total pendapatan yang diterima dengan rata-rata selama periode tahun 2011-2015 sebesar Rp. 2.012.893.926.882,-. Dari data Pendapatan Asli Daerah dan total pendapatan daerah tersebut dapat diketahui derajat desentralisasi fiskal Kota Tangerang Selatan.

Adapun perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Tangerang Selatan periode 2011-2015 dapat dilihat pada Tabel 3.1. berikut.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAPPEDA :	

**Tabel. 3.1  
Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2015**

Tahun	PAD	Total Pendapatan Daerah (juta rupiah)	DSF (%)	Kriteria
2011	420.663.048.857	1.494.990.970.280	28,14%	Sedang
2012	576.304.771.005	1.701.879.043.682	33,86%	Cukup
2013	728.965.301.483	1.971.245.936.682	36,98%	Cukup
2014	1.023.817.429.319	2.294.510.074.893	44,62%	Baik
2015	1.227.825.272.988	2.601.843.608.871	47,19%	Baik
<b>Rata-rata</b>	<b>795.515.164.730</b>	<b>2.012.893.926.882</b>	<b>39,52%</b>	<b>Cukup</b>

Sumber: LKPJ Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2015

Dari Tabel 3.1. di atas, rata-rata Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Tangerang Selatan selama periode 2011-2015 sebesar 39,52%, masuk pada kategori **“cukup”**. Namun, walaupun rata-rata termasuk kategori **“cukup”** angka DDF setiap tahunnya mengalami peningkatan, dan pada tahun 2015 mencapai angka 47,19% (**masuk kategori “baik”**). Peningkatan capaian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan terus berupaya untuk meningkatkan kemandirian daerahnya dengan terus mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Selanjutnya untuk mengetahui kinerja pengelolaan keuangan daerah perlu menganalisis aspek kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kinerja pelaksanaan APBD mencerminkan perkembangan pendapatan dan belanja daerah.

### 3.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:
  - 1) Hasil pajak daerah;
  - 2) Hasil retribusi daerah;
  - 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - 4) Lain-lain PAD yang sah;
- b. Dana perimbangan; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

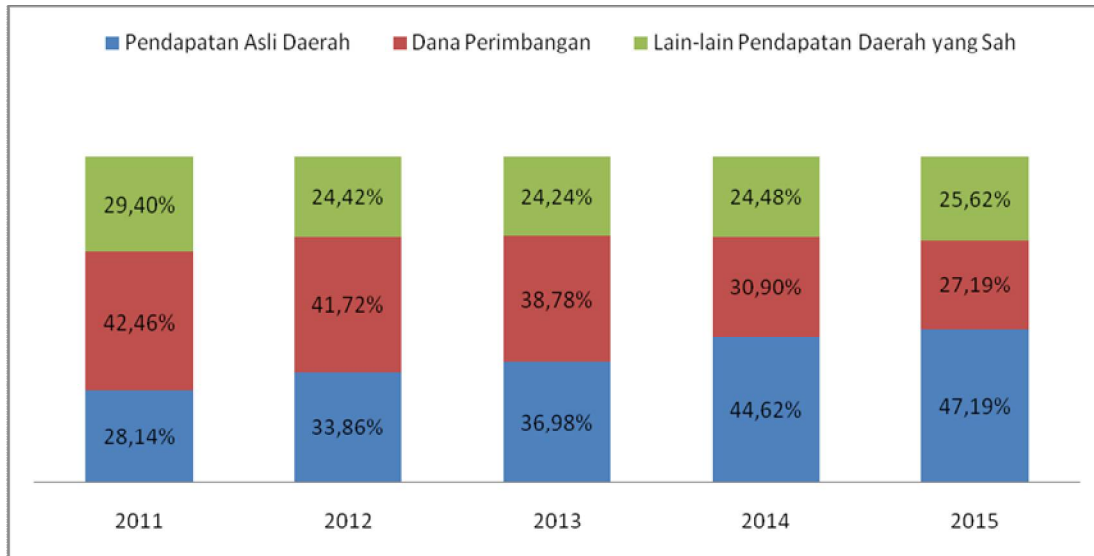
Dilihat dari struktur pendapatan daerah selama 5 tahun terakhir, kontribusi paling besar dalam pembentuk pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, yaitu sebesar 47,19%; disusul Dana Perimbangan sebesar 27,19%; dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 25,62%. Kemudian jika ditelusuri lebih lanjut, kontribusi PAD mengalami tren peningkatan; dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah relatif stabil. Hal

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAPPEDA :	

## RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA TANGERANG SELATAN 2016-2021

ini berimplikasi pada menurunnya kontribusi Dana Perimbangan, dari 42,26% pada tahun 2011, dan terus menurun hingga 27,19% pada tahun 2015. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemandirian pemerintah Kota Tangerang Selatan **cukup baik**.

Adapun Struktur pendapatan APBD Kota Tangerang Selatan selama 5 tahun terlihat dalam Gambar 3.1 berikut ini.



**Gambar 3.1**  
**Struktur Pendapatan APBD Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2015**

Sumber: LKPJ Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2015

Gambaran lengkap mengenai perkembangan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut ini.

**Tabel 3.2**  
**Realisasi Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2015**

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata Pertumbuhan
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>420.663.048.857</b>	<b>576.304.771.005</b>	<b>728.965.301.483</b>	<b>1.023.817.429.319</b>	<b>1.227.825.272.988</b>	<b>68,75%</b>
Hasil Pajak Daerah	378.420.418.487	487.364.145.094	607.251.022.635	864.576.346.012	1.034.522.274.805	87,19%
Hasil Retribusi Daerah	25.984.155.209	65.144.659.971	92.366.248.545	91.545.037.341	103.379.471.622	35,40%
Lain-lain PAD yang sah	16.258.475.161	23.795.965.940	29.348.030.303	67.696.045.966	89.923.526.561	84,07%
<b>Dana Perimbangan</b>	<b>634.793.925.678</b>	<b>710.045.050.158</b>	<b>764.479.468.132</b>	<b>709.085.267.689</b>	<b>707.496.059.913</b>	<b>6,11%</b>
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	164.284.953.678	190.042.283.158	228.036.559.132	124.676.450.689	77.917.780.913	-18,29%
Dana Alokasi Umum	412.540.972.000	473.309.757.000	536.177.454.000	566.429.457.000	609.519.143.000	24,30%
Dana Alokasi Khusus	57.968.000.000	46.693.010.000	265.455.000	17.979.360.000	20.059.136.000	1390,24%
<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>439.533.995.745</b>	<b>415.529.222.519</b>	<b>477.801.167.067</b>	<b>561.607.377.885</b>	<b>666.522.275.970</b>	<b>24,18%</b>
Pendapatan Hibah	2.499.965.000	-	-	-	-	-
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	257.668.357.005	287.820.099.519	338.098.561.067	401.892.280.885	415.478.176.845	19,28%
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	149.045.673.740	83.889.123.000	129.705.606.000	133.704.247.000	128.608.038.000	70,30%
Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	30.320.000.000	43.820.000.000	9.997.000.000	26.010.850.000	122.436.061.125	128,16%
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.494.990.970.280</b>	<b>1.701.879.043.682</b>	<b>1.971.245.936.682</b>	<b>2.294.510.074.893</b>	<b>2.601.843.608.871</b>	<b>24,46%</b>

Sumber: LKPJ Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2015

Analisis perkembangan pendapatan daerah ini dapat dijelaskan antara lain:

(1) Realisasi pendapatan daerah mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAPPEDA :	

## RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA TANGERANG SELATAN 2016-2021

sebesar 24,46%, yang dipengaruhi oleh adanya kenaikan semua unsur-unsur pendapatan daerah, yaitu: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Rata-rata pertumbuhan terbesar terdapat pada Pendapatan Asli Daerah sebesar 68,75%; Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 24,18%; kemudian Dana Perimbangan sebesar 6,11%.

- (2) Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat signifikan, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 68,75%. Semua komponen pembentuk PAD mengalami kecenderungan peningkatan. Peningkatan yang cukup signifikan terdapat pada Pajak Daerah, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 87,19%, disusul Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar 94,07%, kemudian Retribusi Daerah sebesar 35,40%. Kenaikan yang cukup signifikan dari unsur PAD tersebut menunjukkan adanya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, terutama pajak daerah. Selain itu, meningkatnya PAD menunjukkan geliat perekonomian di Kota Tangerang Selatan semakin meningkat seiring meningkatnya pendapatan dunia usaha. Diharapkan dengan semakin meningkatnya PAD dapat meningkatkan kemandirian daerah, yang secara rata-rata selama tahun 2011-2015 sudah dalam kategori “cukup”.
- (3) Realisasi penerimaan dana perimbangan mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,11%. Dilihat dari komponen pembentuk Dana Perimbangan, pertumbuhan tertinggi terdapat pada Dana Alokasi Khusus dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1390,24%; selanjutnya Dana Alokasi Umum sebesar 24,30%; kemudian Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak mengalami pertumbuhan negatif, yaitu sebesar -18,29%.
- (4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 24,18%. Dilihat dari komponen pembentuk Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, pertumbuhan tertinggi terdapat pada Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya sebesar 128,16%; Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 70,30%; kemudian Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar 19,28%.

Adapun Pertumbuhan masing-masing komponen pendapatan daerah dari tahun 2011-2015 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.3. berikut ini.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAPPEDA :	

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)  
KOTA TANGERANG SELATAN 2016-2021**

**Tabel. 3.3  
Pertumbuhan Masing-Masing Komponen Pendapatan Daerah  
Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2015**

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>219,90%</b>	<b>37,00%</b>	<b>26,49%</b>	<b>40,45%</b>	<b>19,93%</b>	<b>68,75%</b>
Hasil Pajak Daerah	320,55%	28,79%	24,60%	42,38%	19,66%	87,19%
Hasil Retribusi Daerah	-27,53%	150,71%	41,79%	-0,89%	12,93%	35,40%
Lain-lain PAD yang sah	187,14%	46,36%	23,33%	130,67%	32,83%	84,07%
<b>Dana Perimbangan</b>	<b>18,48%</b>	<b>11,85%</b>	<b>7,67%</b>	<b>-7,25%</b>	<b>-0,22%</b>	<b>6,11%</b>
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	-44,30%	15,68%	19,99%	-45,33%	-37,50%	-18,29%
Dana Alokasi Umum	80,26%	14,73%	13,28%	5,64%	7,61%	24,30%
Dana Alokasi Khusus	385,47%	-19,45%	-99,43%	6673,03%	11,57%	1390,24%
<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>75,16%</b>	<b>-5,46%</b>	<b>14,99%</b>	<b>17,54%</b>	<b>18,68%</b>	<b>24,18%</b>
Pendapatan Hibah	-90,71%	-	-	-	-	-
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	44,96%	11,70%	17,47%	18,87%	3,38%	19,28%
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	341,30%	-43,72%	54,62%	3,08%	-3,81%	70,30%
Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	142,56%	44,53%	-77,19%	160,19%	370,71%	128,16%
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>62,82%</b>	<b>13,84%</b>	<b>15,83%</b>	<b>16,40%</b>	<b>13,39%</b>	<b>24,46%</b>

Sumber: LKPJ Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2015

Selanjutnya kontribusi masing-masing sumber pendapatan daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2015 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.4. berikut ini.

**Tabel. 3.4  
Perkembangan Kontribusi Sumber Pendapatan Daerah  
Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2015**

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>28,14%</b>	<b>33,86%</b>	<b>36,98%</b>	<b>44,62%</b>	<b>47,19%</b>
Hasil Pajak Daerah	89,96%	84,57%	83,30%	84,45%	84,26%
Hasil Retribusi Daerah	6,18%	11,30%	12,67%	8,94%	8,42%
Lain-lain PAD yang sah	3,86%	4,13%	4,03%	6,61%	7,32%
<b>Dana Perimbangan</b>	<b>42,46%</b>	<b>41,72%</b>	<b>38,78%</b>	<b>30,90%</b>	<b>27,19%</b>
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	25,88%	26,76%	29,83%	17,58%	11,01%
Dana Alokasi Umum	64,99%	66,66%	70,14%	79,88%	86,15%
Dana Alokasi Khusus	9,13%	6,58%	0,03%	2,54%	2,84%
<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>29,40%</b>	<b>24,42%</b>	<b>24,24%</b>	<b>24,48%</b>	<b>25,62%</b>
Pendapatan Hibah	0,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	58,62%	69,27%	70,76%	71,56%	62,34%
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	33,91%	20,19%	27,15%	23,81%	19,30%
Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	6,90%	10,55%	2,09%	4,63%	18,37%
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Sumber: LKPJ Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2015

Berdasarkan Tabel 3.4. diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (a) Komponen pembentuk Pendapatan Daerah yang memiliki kontribusi terbesar didominasi oleh Pendapatan Asli Daerah, yaitu sebesar 47,19%, selanjutnya Dana Perimbangan sebesar 27,19%, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 25,62%
- (b) Komponen Pendapatan Asli Daerah, kontribusi terbesar adalah Pajak Daerah sebesar

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAPPEDA :	

## RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA TANGERANG SELATAN 2016-2021

84,26%; Retribusi Daerah sebesar 8,42%; dan Lain-Lain PAD yang sah sebesar 7,32%.

- (c) Komponen Dana Perimbangan, kontribusi terbesar adalah Dana Alokasi Umum sebesar 86,15%; kemudian Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar 11,01%; dan Dana Alokasi Khusus sebesar 2,84%
- (d) Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, kontribusi terbesar adalah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar 62,34%; Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar 19,30%; dan Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya sebesar 18,37%. Selanjutnya Pendapatan Hibah sebesar 0%.

Dalam pengelolaan pendapatan daerah, walaupun pendapatan daerah mengalami peningkatan setiap tahunnya yang ditandai dengan adanya pelampauan target yang signifikan, tidak berarti tidak ada masalah dalam pengelolaannya. Berdasarkan informasi dari LKPJ tahun 2015. Permasalahan yang dihadapi terkait pengelolaan pendapatan daerah di Kota Tangerang selatan pada tahun 2015, diantaranya adalah:

- (a) Masih terdapat potensi pajak yang belum dipungut, hal tersebut disebabkan oleh belum didaftarkannya legalitas usaha oleh wajib pajak;
- (b) Belum optimalnya pemahaman, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak daerah dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak;
- (c) Masih rendahnya kesadaran dan keterbukaan wajib pajak dalam melaporkan omzet perusahaan sehingga berakibat pada belum optimalnya realisasi penerimaan pajak daerah;
- (d) Kondisi obyektif masih kurangnya kuantitas dan rendahnya kualitas sumber daya manusia pengelola pajak daerah;

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, diantaranya sebagai berikut:

- (a) Terus melakukan sosialisasi regulasi pajak dan retribusi daerah sehingga masyarakat dan dunia usaha memahami secara baik dan terdorong untuk memenuhi kewajiban membayar pajak dan retribusi;
- (b) Peningkatan kualitas sumber daya aparatur pengelola pendapatan untuk meningkatkan hasil pajak dan retribusi daerah;
- (c) Meningkatkan koordinasi guna mengintegrasikan semua unsur kebijakan yang berkaitan dengan penerimaan pendapatan daerah yang bersifat lintas sektoral;
- (d) Menyampaikan daftar pelaku usaha yang belum memiliki legalitas usaha ke SKPD

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAPPEDA :	

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)  
KOTA TANGERANG SELATAN 2016-2021**

terkait dalam rangka mendorong percepatan pemberian legalitas usaha sehingga dapat ditetapkan sebagai wajib pajak; dan

- (e) Melakukan pemeriksaan pajak daerah untuk menguji kepatuhan wajib pajak.

Selanjutnya jika dilihat dari realisasi belanja daerah, pertumbuhan tertinggi terdapat pada Belanja Langsung, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 43,61% sedangkan Belanja Tidak Langsung rata-rata tumbuh sebesar 15,47%. Perkembangan realisasi belanja daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2015 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.5. berikut ini.

**Tabel. 3.5  
Perkembangan Realisasi Belanja Daerah  
Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2015**

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-Rata Pertumbuhan
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>474.845.994.987</b>	<b>471.833.082.021</b>	<b>515.363.002.404</b>	<b>567.417.473.463</b>	<b>703.651.852.677</b>	<b>15,47%</b>
Belanja Pegawai	369.465.067.812	444.825.146.011	490.087.724.540	526.208.439.814	601.273.190.355	16,41%
Belanja Hibah	84.245.131.965	19.608.900.000	19.585.750.000	40.314.744.400	101.454.678.768	47,10%
Belanja Bantuan Sosial	12.562.200.000	5.057.900.000	5.223.040.000	308.100.000	-	2,42%
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	8.573.595.210	1.108.103.210	278.683.964	314.669.281	382.068.414	-26,20%
Belanja Tidak Terduga	-	1.233.032.800	187.803.900	271.519.968	541.915.140	11,88%
<b>Belanja Langsung</b>	<b>814.592.940.296</b>	<b>1.271.356.893.860</b>	<b>1.274.081.003.856</b>	<b>1.518.633.477.083</b>	<b>1.897.873.042.566</b>	<b>43,61%</b>
Belanja Pegawai	89.781.858.160	144.875.496.550	172.262.297.500	210.235.476.675	255.711.451.680	32,05%
Belanja Barang dan Jasa	302.295.625.451	434.834.542.980	540.630.326.410	599.580.547.439	660.085.137.289	42,73%
Belanja Modal	422.515.456.685	691.646.854.330	561.188.379.946	708.817.452.969	982.076.453.597	50,55%
<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>	<b>1.289.438.935.283</b>	<b>1.743.189.975.881</b>	<b>1.789.444.006.260</b>	<b>2.086.050.950.546</b>	<b>2.601.524.895.243</b>	<b>31,30%</b>

Sumber: LKPJ Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2015

Analisis perkembangan belanja daerah ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Realisasi belanja daerah, pertumbuhan tertinggi terdapat pada Belanja Langsung, dengan rata-rata sebesar 43,61%, sedangkan Belanja Tidak Langsung rata-rata tumbuh sebesar 15,47%.
- (2) Persentase realisasi belanja tidak langsung cenderung meningkat pada periode 2011-2015 yang disebabkan meningkatkan semua unsur, kecuali Belanja Bantuan Sosial
- (3) Realisasi belanja langsung mengalami peningkatan yang cukup signifikan, meningkatnya realisasi belanja langsung karena kenaikan unsur belanja barang dan jasa, belanja pegawai, serta belanja modal, Ketiga unsur tersebut setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan hingga tahun 2015.
- (4) Terjadinya kenaikan porsi realisasi belanja tidak langsung dan realisasi belanja langsung menggambarkan bahwa kebutuhan pemerintah daerah dalam pembangunan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu perlu adanya optimalisasi anggaran agar tingginya penyerapan anggaran berbanding lurus dengan keberhasilan pembangunan daerah yang telah direncanakan.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAPPEDA :	

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)  
KOTA TANGERANG SELATAN 2016-2021**

**Tabel. 3.6  
Proporsi Realisasi Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2015**

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Rata2
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>36,83%</b>	<b>27,07%</b>	<b>28,80%</b>	<b>27,20%</b>	<b>27,05%</b>	<b>29,39%</b>
Belanja Pegawai	77,81%	94,28%	95,10%	92,74%	85,45%	89,08%
Belanja Hibah	17,74%	4,16%	3,80%	7,10%	14,42%	9,44%
Belanja Bantuan Sosial	2,65%	1,07%	1,01%	0,05%	0%	0,96%
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	1,81%	0,23%	0,05%	0,06%	0,05%	0,44%
Belanja Tidak Terduga	0,00%	0,26%	0,04%	0,05%	0,08%	0,09%
<b>Belanja Langsung</b>	<b>63,17%</b>	<b>72,93%</b>	<b>71,20%</b>	<b>72,80%</b>	<b>72,95%</b>	<b>70,61%</b>
Belanja Pegawai	11,02%	11,40%	13,52%	13,84%	13,47%	12,65%
Belanja Barang dan Jasa	37,11%	34,20%	42,43%	39,48%	34,78%	37,60%
Belanja Modal	51,87%	54,40%	44,05%	46,67%	51,75%	49,75%
<b>Jumlah Belanja Daerah</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Sumber: LKPJ Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2015

Analisis proporsi realisasi belanja daerah ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Realisasi belanja daerah, kontribusi rata-rata tertinggi terdapat pada Belanja Langsung dengan rata-rata sebesar 70,61%, sedangkan Belanja Tidak Langsung dengan rata-rata sebesar 29,39%.
- (2) Belanja Tidak Langsung memiliki rata-rata kontribusi sebesar 29,39%, kontribusi yang paling tinggi untuk belanja tidak langsung adalah dari belanja pegawai dengan rata-rata kontribusi sebesar 89,08%. Sedangkan untuk rata-rata kontribusi belanja hibah sebesar 9,44%; dan rata-rata kontribusi yang paling rendah adalah belanja Tak Terduga dengan rata-rata sebesar 0,09%.
- (3) Belanja Langsung memiliki kontribusi terbesar dengan rata-rata kontribusi sebesar 70,61%. Kontribusi terbesar untuk belanja langsung berasal dari belanja modal dengan rata-rata sebesar 49,75%, sedangkan rata-rata kontribusi terendah dari belanja pegawai yang hanya sebesar 12,65%.

Berdasarkan informasi dari LKPJ Kota Tangerang Selatan tahun 2016, kondisi obyektif masih besarnya sisa anggaran belanja pada realisasi Belanja Langsung APBD Tahun Anggaran 2015, diantaranya disebabkan oleh beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan :
  - a) Keterlambatan proses pengadaan pada kegiatan yang telah dianggarkan, di antaranya disebabkan oleh adanya perubahan regulasi terkait pengadaan barang/jasa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Meskipun telah ditetapkan pada

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAPPEDA :	



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)  
KOTA TANGERANG SELATAN 2016-2021**

tahun 2010, namun mekanisme dan ketentuan yang belum difahami sepenuhnya oleh sebagian besar pengelola teknis kegiatan harus sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya, kemudian diganti dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012, sehingga berpengaruh terhadap terlambatnya waktu pelaksanaan lelang.

- b) Terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Kerja Aparatur Negara. Hal tersebut berakibat pada terjadinya sisa anggaran di beberapa sebesar Rp. 14,7 Milyar disebabkan tidak diserapnya anggaran perjalanan dinas Luar Negeri dan kegiatan yang menggunakan akomodasi hotel.
- c) Regulasi yang mengatur tentang proses dan tahapan pelaksanaan kegiatan pengadaan lahan sebagaimana diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, secara normatif menjelaskan bahwa pengadaan tanah/lahan memerlukan waktu dan prosedur yang panjang, sehingga target penyelesaian pengadaan tanah/lahan di beberapa lokasi tidak dapat diselesaikan tepat waktu.

2. Kendala teknis

- a) Proses Pengadaan Barang dan Jasa masih belum sepenuhnya dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai jadwal rencana penyelesaian pekerjaan. Kondisi Tahun 2011 dimana Unit Layanan Pengadaan (ULP) baru dibentuk pada Tahun 2014 melalui Surat Keputusan Walikota Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Layanan pengadaan (ULP) Kota Tangerang Selatan. Terdapat beberapa permasalahan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Kota Tangerang Selatan sebagai berikut:
  - Diawal terbentuknya ULP sampai akhir tahun 2014, kondisi Sumber Daya Aparatur ULP masih terbatas, hal ini berdampak pada banyaknya administrasi paket lelang pekerjaan yang lambat tertangani sehingga berakibat lambatnya proses lelang itu sendiri dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada tahun anggaran berjalan;

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAPPEDA :	

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)  
KOTA TANGERANG SELATAN 2016-2021**

- Lemahnya perencanaan teknis pekerjaan yang akan dilelangkan, diantaranya terkait belum lengkapnya kajian teknis seperti FS dan DED pada paket pekerjaan yang akan dilelangkan berakibat mundurnya waktu pelelangan dan berudampak pada mundurnya waktu pelaksanaan pekerjaan.

Diantaranya pada Tahun 2013 selain dari adanya efisiensi dari nilai kontrak terdapat 211 paket pekerjaan yang tidak selesai sehingga berakibat terjadinya sisa anggaran sebesar Rp. 75.658.982.091,- juga disebabkan oleh, perubahan desain bangunan gedung PUSPEM yang disesuaikan dengan hasil rekomendasi Kementerian Pekerjaan Umum membutuhkan waktu 2 (dua) bulan sehingga proses lelang baru dapat diselesaikan bulan Desember 2013. Hal tersebut berakibat pada tidak terserapnya uang muka pekerjaan sebesar Rp.33.509.002.500,- waktu pelaksanaan pekerjaan pada kegiatan yang dianggarkan di Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 tidak cukup, berakibat 4 (empat) paket pekerjaan tidak dapat dilaksanakan, 32 paket pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat waktu. Hal tersebut juga disebabkan oleh kurang matangnya perencanaan teknis pada paket pekerjaan tersebut.

Pada tahun 2014 terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 211,4 milyar lebih, diantaranya disebabkan adanya paket yang batal lelang dikarenakan bangunan fisik yang dikerjakan sebelumnya (tahap 1) belum selesai dikerjakan, kegiatan yang putus kontrak karena fisik tidak mencapai 100%, kegiatan yang gagal lelang, efisiensi kontrak sebesar Rp.62,428 milyar dan sisa anggaran sebesar Rp.124,238 milyar merupakan paket multiyears yang baru dicairkan uang mukanya sebesar Rp. 18,635 milyar (15%).

Pada Tahun 2014 terdapat beberapa paket pekerjaan pada urusan kesehatan dengan sisa anggaran sebesar Rp.66,4 milyar lebih, yang disebabkan oleh; terdapat kendala teknis yang diakibatkan kesalahan pada perencanaan teknis sehingga terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Farmasi maupun Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) yang dianggarkan pada perubahan APBD. Dimana untuk pengadaan BMHP Labkesda terdapat kerendahan harga dari item barang yang terdapat pada DPA ketika dilakukan survey HPS (Harga Perkiraan Sendiri). Terkait pelaksanaan Jaminan Kesehatan, banyak pasien Jaminan Kesehatan Daerah yang beralih ke BPJS Kesehatan untuk menjadi peserta BPJS mandiri, terutama

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAPPEDA :	

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)  
KOTA TANGERANG SELATAN 2016-2021**

pasien-pasien yang menderita penyakit kronis seperti gagal ginjal. Sehingga tagihan Jamkesda dari Rumah Sakit berkurang, selain itu juga beberapa RS mitra terlambat mengajukan klaim Jamkesda. Tidak terlaksananya pembangunan puskesmas Pondok Cabe Ilir dan pengembangan puskesmas Pondok Jagung, serta pengadaan alat kesehatan (Alkes) disebabkan tidak cukup waktu untuk pelaksanaannya. Produk hukum tentang pelayanan kesehatan program JKN baru dirilis oleh Kemenkes RI pada bulan Mei sehingga Dinas Kesehatan dalam implementasinya mengalami beberapa kesulitan. Kemudian Peraturan Walikota tentang Jasa Pelayanan (Jaspel) Kesehatan terhadap masyarakat dan luar Kota Tangerang Selatan juga masih dalam proses, sehingga pencairan dana Jaspel yang telah dianggarkan tersebut tidak dapat dilakukan hingga akhir tahun.

- Masih terdapat pekerjaan fisik di tahun 2011-2014 yang dianggarkan atau baru dilelang di Perubahan APBD, sehingga tidak cukup waktu pelaksanaan yang berakibat tidak selesainya pekerjaan.

Pada tahun 2013 terdapat 23 paket pekerjaan yang tidak selesai atau 0,88% dari total kurang lebih 2.599 paket pekerjaan oleh penyedia setelah melewati batas waktu, penundaan relokasi pedagang pasar jengkol menunggu setelah lebaran, adanya penolakan warga terhadap pembangunan TPST3R, tahapan teknis yang harus ditempuh secara normatif dalam kegiatan pengadaan tanah untuk pembebasan tanah sebanyak 409 bidang yang tersebar pada 15 lokasi, memerlukan waktu yang relatif lama. Proses negosiasi harga yang dilakukan antara panitia pengadaan tanah dengan masyarakat di tiap lokasi pembebasan memerlukan beberapa kali pembahasan, sehingga sampai akhir tahun hanya dapat diselesaikan pembebasan untuk 280 bidang (68%). Di samping proses negosiasi harga, terdapat beberapa kendala teknis lain diantaranya, adanya dokumen Akta Tukar Menukar yang masih menunggu pendapat hukum dari Keaksan Negeri Tangerang pada pengadaan tanah untuk Kantor Kelurahan Lengkong Gudang Timur, menunggu pendapat hukum dari Kejaksaan Negeri Tangerang atas sengketa kepemilikan dan pemisahan sumber dana pembangunan eks kantor desa yang saat ini akan dibebaskan untuk pembangunan kantor Kelurahan Sarua Indah dan Kelurahan Pondok Cabe Ilir;

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAPPEDA :	

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)  
KOTA TANGERANG SELATAN 2016-2021**

b) Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah terkait mekanisme dan prosedur pengadaan terkendala proses negosiasi harga yang membutuhkan waktu lama untuk sampai pada kesepakatan, serta adanya keterkaitan dengan pihak eksternal dalam penyelesaian beberapa sengketa kepemilikan, sehingga proses pembayaran harus menunggu keputusan pengadilan.

Pada tahun 2014 sisa anggaran sebesar Rp.98,3 Milyar lebih (57,55%) di Tahun 2014, disebabkan tidak terealisasinya pengadaan tanah untuk pembangunan Fly Over Gapek sebanyak 42 bidang dari target 123 bidang; pengadaan tanah untuk Kantor Kelurahan Pondok Cabe Ilir dapat diselesaikan 85% yaitu seluas 1.410 m<sup>2</sup> dari 1.600 m<sup>2</sup> yang direncanakan, hal ini disebabkan harga yang disepakati melebihi plafon anggaran yang direncanakan; pengadaan tanah gedung kantor pemerintahan sebanyak 2 bidang tidak dapat dilaksanakan, hal ini disebabkan oleh legalitas surat kepemilikan tanah yang berpotensi sengketa; pelaksanaan sertifikasi tanah aset baru terealisasi 20 bidang dari target 40 bidang di Tahun 2014, hal ini disebabkan 20 bidang lainnya masih berproses pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan.

Berkenaan dengan kendala yang dihadapi, maka langkah-langkah yang telah ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

- Terkait dengan penyesuaian peraturan perundangan-undangan, Pemerintah Daerah senantiasa menyesuaikan dan melakukan percepatan dalam pelaksanaannya. Namun demikian tetap diperlukan kehati-hatian terutama menyikapi perubahan regulasi terkait pengadaan barang dan jasa. Dengan upaya tersebut diharapkan dapat meminimalisir keterlambatan dalam paket pekerjaan lelang namun tetap mempedomani ketentuan yang berlaku. Saat ini di Kota Tangerang Selatan telah sepenuhnya mengikuti ketentuan lelang dengan e-procurement melalui unit layanan pengadaan (ULP). Menyikapi Permenpan Nomor 6 tahun 2015, pemerintah daerah berusaha untuk melakukan efisiensi anggaran khususnya dalam penyelenggaraan kegiatan rapat diluar kantor agar tetap efisien namun tetap memenuhi sasaran yang diharapkan. Terkait kendala faktor eksternal dan kewenangan lembaga/instansi lain dalam hal pengadaan tanah, Pemerintah Daerah terus berupaya melakukan negosiasi harga, pendekatan persuasif dan intensif, sosialisasi bersama tim teknis untuk meyakinkan masyarakat/ pemilik tanah terhadap harga yang sudah dihitung oleh Tim Appraisal, membentuk tim kajian dalam penyelesaian keberatan warga pada tahap persiapan, berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri Tangerang. Sebagai langkah

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAPPEDA :	

## RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA TANGERANG SELATAN 2016-2021

penyelesaian lebih lanjut Pemerintah daerah menginventarisir kembali sisa lokasi/bidang yang belum bisa dibebaskan sebagai target kegiatan pengadaan tanah di tahun berikutnya (tetap ditindaklanjuti) dan terus mengawal proses hukum yang ditempuh melalui pengadilan atau pendapat hukum kejaksaan atas permasalahan atau sengketa yang terjadi, sehingga seluruh target pembebasan lahan yang sudah direncanakan dapat tetap terlaksana dengan baik.

- Terkait kendala yang dihadapi dalam proses pengadaan Barang dan Jasa, Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Tahun 2014 melalui Surat Keputusan Walikota Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya penggunaan aplikasi lelang secara elektronik atau electronic prochurement (e-proch) sudah diterapkan mulai tahun 2013 dan terus disempurnakan pelaksanaannya. Kebijakan lebih lanjut dalam upaya meningkatkan kualitas SDM pada ULP, telah dikeluarkan kebijakan melalui Surat Walikota Tangerang Selatan Nomor 14 Tahun 2014 tentang kewajiban setiap pejabat struktural mengikuti bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa serta memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya untuk meningkatkan kinerja ULP, mulai Tahun Anggaran 2015 ditingkatkan tunjangan kinerjanya.

Hal-hal lain yang terus dilakukan terkait perbaikan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa diantaranya:

- Mematangkan perencanaan teknis di tingkat SKPD mulai dari penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan memperketat kelengkapan dokumen perencanaan teknis pada pekerjaan yang akan dianggarkan pada RKA, baik FS, DED dan Reviu DED serta dokumen teknis lainnya. Pada tahun 2016 bahkan SKPD sudah diwajibkan melampirkan Peta Informasi Lokasi (PILOK) sebagai kelengkapan teknis usulan pekerjaan fisik;
- Selanjutnya telah dilakukan workshop dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang dihadiri oleh seluruh pejabat struktural se Kota Tangerang Selatan dengan nara sumber dari : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan (LKPP).

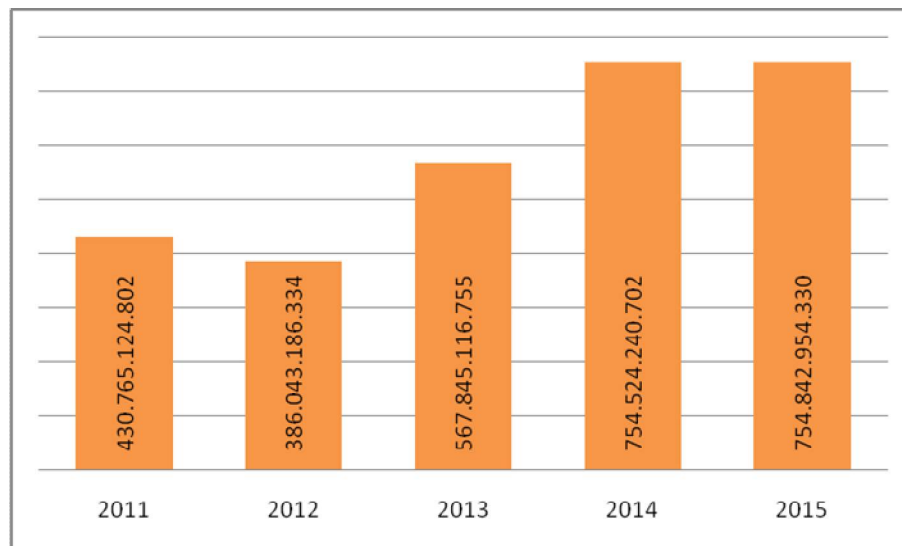
PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAPPEDA :	

## RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA TANGERANG SELATAN 2016-2021

- Mulai Tahun Anggaran 2015 tidak ada lagi pekerjaan fisik yang dianggarkan di perubahan APBD, hal tersebut untuk menghindari adanya pekerjaan yang tidak cukup waktu pelaksanaan sehingga tidak dapat diselesaikan di akhir tahun anggaran.

### 3.2. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)

SILPA Kota Tangerang Selatan cukup tinggi dan kecenderungan mengalami peningkatan, pada tahun 2011 sebesar Rp.430.765.124.802, meningkat hingga Rp.754.842.954.329,- pada tahun 2015. Oleh karena itu, perlu adanya optimalisasi anggaran agar tingginya penyerapan anggaran berbanding lurus dengan keberhasilan pembangunan daerah yang telah direncanakan. Jumlah SILPA Kota Tangerang Selatan dari tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Gambar 3.2. berikut ini.



Sumber: LKPJ Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2015

**Gambar 3.2**  
**SILPA Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2015**

Gambaran lengkap mengenai prediksi perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel 3.7 berikut ini.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAPPEDA :	

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)  
KOTA TANGERANG SELATAN 2016-2021**

**Tabel. 3.7  
Prediksi APBD Tahun 2016 sampai Tahun 2021**

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>PENDAPATAN</b>						
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>1.243.705.400.000</b>	<b>1.260.891.811.000</b>	<b>1.311.138.937.000</b>	<b>1.369.986.012.225</b>	<b>1.437.881.682.750</b>	<b>1.513.433.345.655</b>
Hasil Pajak Daerah	1.031.580.000.000	1.079.636.000.000	1.123.430.315.000	1.175.795.193.225	1.235.994.022.750	1.297.309.727.405
Hasil Retribusi Daerah	73.852.750.000	90.052.771.000	94.361.622.000	98.822.469.000	103.524.892.500	108.398.962.375
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	138.272.650.000	91.203.040.000	93.347.000.000	95.368.350.000	98.362.767.500	107.724.655.875
<b>Dana Perimbangan</b>	<b>874.186.891.950</b>	<b>835.363.230.419</b>	<b>862.476.044.000</b>	<b>862.476.044.000</b>	<b>862.476.044.000</b>	<b>862.476.044.000</b>
Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	144.146.498.000	144.146.498.000	131.640.400.000	131.640.400.000	131.640.400.000	131.640.400.000
Dana Alokasi Umum	581.505.815.000	581.505.815.000	581.505.815.000	581.505.815.000	581.505.815.000	581.505.815.000
Dana Alokasi Khusus	148.534.578.950	109.710.917.419	149.329.829.000	149.329.829.000	149.329.829.000	149.329.829.000
<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>458.479.893.767</b>	<b>449.414.692.267</b>	<b>449.414.692.267</b>	<b>449.414.692.267</b>	<b>449.414.692.267</b>	<b>449.414.692.267</b>
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	449.414.692.267	449.414.692.267	449.414.692.267	449.414.692.267	449.414.692.267	449.414.692.267
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0
Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah daerah Lainnya	9.065.201.500	0	0	0	0	0
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.576.372.185.717</b>	<b>2.545.669.733.686</b>	<b>2.623.029.673.267</b>	<b>2.681.876.748.492</b>	<b>2.749.772.419.017</b>	<b>2.825.324.081.922</b>
<b>BELANJA DAERAH</b>						
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>811.413.560.757</b>	<b>717.328.692.366</b>	<b>755.478.876.985</b>	<b>795.286.320.834</b>	<b>836.833.886.876</b>	<b>880.208.581.219</b>
Belanja Pegawai	729.015.399.464	662.903.692.366	696.048.876.985	730.851.320.834	767.393.886.876	805.763.581.219
Belanja Hibah	67.490.395.000	30.000.000.000	35.000.000.000	40.000.000.000	45.000.000.000	50.000.000.000
Belanja Bantuan Sosial	0	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000

PARAF KOORDINASI

KEPALA BAPPEDA :

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)  
KOTA TANGERANG SELATAN 2016-2021**

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	416.319.293	425.000.000	430.000.000	435.000.000	440.000.000	445.000.000
Belanja Tidak Terduga	14.491.447.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000
<b>Belanja Langsung</b>	<b>2.493.308.806.642</b>	<b>2.206.341.041.320</b>	<b>2.245.550.796.282</b>	<b>2.239.590.427.658</b>	<b>2.312.938.532.141</b>	<b>2.345.115.500.703</b>
Belanja Pegawai	335.810.816.300	281.921.875.477	296.017.969.251	310.818.867.714	326.359.811.099	342.677.801.654
Belanja Barang dan Jasa	864.688.199.374	727.743.863.861	764.131.057.054	702.337.609.907	692.454.490.402	704.577.214.922
Belanja Modal	1.292.809.790.968	1.196.675.301.982	1.185.401.769.977	1.226.433.950.037	1.294.124.230.640	1.297.860.484.127
<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>	<b>3.304.722.367.399</b>	<b>2.923.669.733.686</b>	<b>3.001.029.673.267</b>	<b>3.034.876.748.492</b>	<b>3.149.772.419.017</b>	<b>3.225.324.081.922</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>-728.350.181.682</b>	<b>-378.000.000.000</b>	<b>-378.000.000.000</b>	<b>-353.000.000.000</b>	<b>-400.000.000.000</b>	<b>-400.000.000.000</b>
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>						
<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>728.350.181.682</b>	<b>400.000.000.000</b>	<b>400.000.000.000</b>	<b>375.000.000.000</b>	<b>400.000.000.000</b>	<b>400.000.000.000</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	728.350.181.682	400.000.000.000	400.000.000.000	375.000.000.000	400.000.000.000	400.000.000.000
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>728.350.181.682</b>	<b>400.000.000.000</b>	<b>400.000.000.000</b>	<b>375.000.000.000</b>	<b>400.000.000.000</b>	<b>400.000.000.000</b>
<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>0</b>	<b>22.000.000.000</b>	<b>22.000.000.000</b>	<b>22.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0	22.000.000.000	22.000.000.000	22.000.000.000	0	0
<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>0</b>	<b>22.000.000.000</b>	<b>22.000.000.000</b>	<b>22.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>728.350.181.682</b>	<b>378.000.000.000</b>	<b>378.000.000.000</b>	<b>353.000.000.000</b>	<b>400.000.000.000</b>	<b>400.000.000.000</b>
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sumber: DPPKAD Kota Tangerang Selatan dan Analisis Prediksi APBD, 2016

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAPPEDA :	